

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia telah berjalan lebih dari 20 tahun sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Undang-undang tersebut juga mengatur posisi dan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Daerah otonom tersebut diberikan wewenang yang besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berada di wilayah masing-masing pemerintah daerah (Zebua & Noval Adib, 2013).

Adanya otonomi daerah maka terjadi penyusunan program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013). Adapun proses pembangunan yang dimaksud hendaknya mencakup segala aspek pembangunan termasuk pembangunan manusia. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya manusia adalah kekayaan

bangsa yang sesungguhnya. Indikator keberhasilan suatu daerah dalam proses pembangunan manusia dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan tolak ukur penilaian terhadap pemerataan pembangunan. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah tersebut (Alkhoiriyah & Sa'roni, 2021).

Pembangunan manusia yang berkualitas menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembangunan karena sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Semakin tinggi kapabilitas dasar sumber daya manusia yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf (Zaufi, Taufik, & Agusti, 2016).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat berada pada kategori tinggi, namun capaian kategori tinggi tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Masih ada beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang capaian IPM daerahnya belum merata (BPS, 2022). Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan ketidakmerataan kebijakan yang diberlakukan di masing-masing daerah karena seharusnya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus lah bermanfaat bagi setiap masyarakatnya dengan cara mempermudah

mereka untuk mengakses setiap dimensi dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Standar Hidup Layak.

Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM dapat dipengaruhi melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi Fiskal merupakan salah satu instrumen untuk mengoptimalkan layanan publik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah (Hadi & Saragih, 2013). Pemerintah daerah dapat menggunakan instrument kebijakan fiskal seperti memaksimalkan penggunaan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan belanja untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia. Pendapatan keuangan daerah merupakan suatu kemampuan daerah yang semestinya dapat dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah. Anggaran semestinya dapat dimanfaatkan secara produktif, yakni dialokasikan pada bidang yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti bidang pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan bidang kesehatan (Pramartha & Dwirandra, 2018).

Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia juga adalah belanja modal. Belanja modal mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran belanja modal sangat penting, jika belanja modal disalurkan tepat sasaran maka akan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi sehingga

secara otomatis akan meningkatkan Indeks pembangunan manusia (Handayani, Soleh, Santoso, & Rahayu, 2022). Melalui pengalokasian belanja modal yang tepat, maka akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengalokasian anggaran belanja ke dalam pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat (Zebua & Noval Adib, 2013). Selain itu, alokasi belanja modal yang baik juga akan sangat mempengaruhi kelayakan hidup semua masyarakat karena seyogyanya belanja modal diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang mana nantinya akan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dalam rangka mengakses pendapatan.

Terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia yang sudah banyak dilakukan penelitian, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan & Arief, 2019) mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 - 2017)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 9 Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2017.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zebua & Noval Adib, 2013) mengenai “Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi pada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-

2013)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal berefek positif terhadap IPM kabupaten/kota di Jawa Barat.

Sementara itu, penelitian dari (Pramartha & Dwirandra, 2018) mengenai “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Swasta Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” mendapatkan hasil yang kontra dari penelitian sebelumnya. Hasilnya membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan ketidakstabilan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik dalam melakukan penelitian ulang dan ingin membuktikan secara empiris terkait pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia menjadi satu hal yang penting untuk diteliti karena dengan diketahuinya indeks pembangunan manusia untuk mengetahui sebagaimana besar kesuksesan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Setyawan & Arief, 2019) yaitu penelitian mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Lalu perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pada pemilihan tahun pengamatan penelitian yang diteliti. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2008-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2018-2022.

2. Pada unit observasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada kota yang bearada di Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Wilayah Jawa Barat.
3. Pada sampel penelitian, sampel penelitian sebelumnya mengambil sebanyak 9 Kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 27 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan teori dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA”** (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022).

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan antara lain:

1. Bagaimana Desentralisasi Fiskal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Bagaimana Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

4. Berapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
5. Berapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui tingkat Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
3. Untuk mengetahui tingkat Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna, baik kegunaan secara teoritis dan praktis baik bagi penulis maupun bagi instansi itu sendiri.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi yang membahas akuntansi pemerintah dan sektor publik khususnya mengenai Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain salah satu syarat dalam melaksanakan Usulan Penelitian pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, diharap dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih pola pikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di

kuliah dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti.

b. **Bagi Instansi**

Berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membuat kebijakan, memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial, dan juga dapat memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pembangunan pada pemerintah.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dilakukan pada Juni 2023 sampai dengan selesai.